



**KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO TERHADAP PERAN PARTAI
POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE LAMA**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Humaniora dalam Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam

Oleh:

DESTRI RAPITA
NIM. (1384132)

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

2016

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dua hari kemudian Indonesia menyatakan kemerdekaannya di bawah pimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa periode dan babak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Setelah memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka, Indonesia berusaha membenahi stabilitas negara untuk membentuk suatu negara yang berdaulat. Dalam masa awal kemerdekaan dibentuklah BPUPKI sebagai badan yang menyiapkan kemerdekaan. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dibutuhkan suatu dasar negara untuk bisa menjalankan kehidupan pemerintahan bernegara. Pembentukan dasar negara ini memerlukan suatu penggodokan yang matang mengingat Indonesia yang baru merdeka memiliki keanekaragaman budaya dan keyakinan.¹

Dalam perkembangannya pada tahun 1950 dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah payung Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 menurut UUDS hidup mati suatu kabinet sepenuhnya ditentukan oleh besar kecilnya dukungan yang diperoleh dalam parlemen. Kedudukan presiden menurut UUDS adalah sebagai kepala negara simbol yang tidak memimpin pemerintahan

¹Adang Muchtar Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hal. 123

secara langsung. Sementara itu kekuasaan pemerintah yang riil dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet, dan Parlemen. Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Pada masa itu terdapat banyak partai di antaranya: Masyumi, NU, PSII, Perti, PNI, PKI, dll.²

Perkembangan demokrasi liberal yang ditandai dengan banyak partai itu ternyata tidak menguntungkan bagi negara yang berdasarkan Pancasila ini. Persaingan antar golongan atau partai tidak terelakkan. Persaingan itu menjurus kepada pertentangan golongan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sebab masing-masing partai atau golongan ingin menangnya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan umum. Akibatnya pemerintah menjadi tidak stabil. Kabinet yang dibentuk jatuh bangun karena saling tidak percaya di antara masing-masing partai yang ada di DPR.³

Selain itu, perdebatan tentang dasar ideologi negara dalam majelis konstituante berlangsung sampai rapatnya yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, tanpa suatu keputusan. Dengan demikian pembuatan suatu Undang-Undang Dasar permanen menjadi terbengkalai. Pihak pemerintah membaca situasi ini sebagai suatu kemacetan konstitusional yang serius. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno dengan sokongan penuh dari pihak militer mengeluarkan Dekrit dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 untuk menggantikan UUDS 1950. Situasi ini telah mengguncangkan umat Islam, baik secara politik maupun secara psikologis. Di bawah payung UUD, Soekarno telah menggenggam kembali pimpinan politik nasional dengan kekuasaan yang hampir-hampir tak

² Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: 1987, hal. 159

³ Qodri A. Azizy, *Jejak-jejak Islam Politik*. Jakarta: Ditjen Bagais. 2004, hal. 221

terbatas. Atau dalam ungkapan sarjana Australia J.D. Legge: “*He had recovered his central position in the nation’s affairs*” Ia (Soekarno) telah merebut kembali posisi sentralnya dalam persoalan bangsa. Bagian ini memusatkan perhatiannya pada realitas politik yang tidak menguntungkan umat Islam pasca pembubaran Majelis Konstituante. Dengan berlakunya kembali UUD, maka dasar Islam yang diusulkan dengan sendirinya tertolak melalui sebuah dekrit, bukan melalui suatu musyawarah yang demokratis. Majelis konstituante sampai dengan sidangnya terakhir tidak berhasil mencapai kata sepakat tentang dasar negara: Pancasila atau Islam.⁴ Selain itu, ada beberapa alasan bagi Soekarno mengeluarkan Dekritnya. Pertama, anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali ke UUD tidak memperoleh jawaban dari konstituante. Kedua, sebagian besar anggota konstituante menyatakan *walk out* dari sidang, sehingga tugas-tugas mereka tak bisa terselesaikan. Ketiga, keadaan demikian menimbulkan bahaya bagi ketatanegaraan dan keselamatan negara. Akhirnya, pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya adalah menetapkan pembubaran Konstituante, kembali kepada UUD 1945 sebagai konstitusi negara, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).⁵

Semenjak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka muncullah kebijakan pemerintah yaitu pembentukan MPRS (Majelis Pemusawaratan Rakyat Sementara) berdasarkan Penpres No. 2 tahun 1959 anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan tiga syarat, yaitu Setuju kembali kepada UUD

⁴ Ahmad Syafii Ma’arif, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu (Masa Demokrasi Terpimpin)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 44

⁵ Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: PT Gunung Agung. 1982, hal. 32

1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju kepada manifesto politik. Selain itu, Soekarno membentuk DPAS yang diketuai langsung oleh Presiden sendiri.⁶

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin adalah:⁷

1. Mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik dipemerintahan (karena pemilu tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik tambang antara Presiden Soekarno, angkatan darat, dan PKI.
2. Dengan terbentuknya DPR-GR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden.
3. *Basic human rights* menjadi sangat lemah. Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politik yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya.
4. Masa Demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh Soekarno, seperti misalnya *Harian Abadi* dari Masyumi dan *Harian Pedoman* dari PSI.
5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi

⁶Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Idayu Press, 1977, hal. 15-16

⁷Hans, D.K., Richard, I.H., Ian B, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*. Terjemahan Sigit Jatmiko. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 130

yang sangat terbatas. UU tentang Otonomi Daerah NO. 1/1957, digantikan dengan Penetapan Presiden, yang kemudian dikembangkan menjadi UU No.18 thn 1965.

Era ini dapat dianggap sebagai masa-masa sulit bagi partai Islam. Setelah mengeluarkan dekrit, Soekarno yang sudah terobsesi untuk menjadi penguasa mutlak di Indonesia memaksa pembubaran Partai Masyumi pada 17 Agustus 1960. Dengan alat Penpres yang dikeluarkan oleh Soekarno mengakibatkan partai-partai politik terutama partai politik Islam harus tunduk dan patuh pada sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, karena apabila menentang sistem pemerintahan Soekarno akan bernasib sama seperti Masyumi yang dibubarkan.⁸

Sejak masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan berpusat pada tiga kekuasaan utama, yaitu: Soekarno, PKI, dan TNI-AD, sedangkan yang lainnya meskipun ada tak begitu berperan. Masa ini ditandai oleh dominasi Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis serta meluasnya peranan ABRI sebagai sosial politik. Pada masa itu, partai yang berhaluan kanan yang bersikap menentang kebijakan Soekarno terpental keluar dari arena politik. Misalnya Masyumi, akhirnya mengalami nasib tragis harus tersingkir dari panggung politik. Sebelum dibubarkan Soekarno Masyumi terlebih dahulu membubarkan diri. Partai Masyumi sebagai gerakan organisasi politik Islam radikal, dipandang Soekarno lebih berbahaya daripada PKI. Penampilan para pemimpin PKI selalu kelihatan menurut dan tunduk patuh di hadapan Soekarno. Sedangkan para tokoh Masyumi nampak sering bersikap menentang terhadap

⁸Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Hingga Terkini*, Yogyakarta: DIVA Press, 2014, hal. 364

kebijakan-kebijakan Soekarno. Masyumi terbiasa mengkritik tajam atas kebijakan Soekarno yang dianggap mulai melenceng meninggalkan prinsip-prinsip dasar kehidupan tatanan kenegaraan. Hal ini membuat Soekarno tidak menyukai Masyumi.⁹

Pemusatan kekuasaan di tangan seorang pemimpin dalam hal ini Soekarno mempunyai konsekuensi politik yang berbeda bagi partai-partai Islam. Sayap pesantren, yaitu NU bersama PSII dan Perti, diizinkan hidup di bawah payung Demokrasi Terpimpin dengan gaya dan retorika politik masing-masing. Partai-partai ini telah melakukan berbagai langkah penyesuaian diri dengan berbagai perkembangan politik yang serba sulit. Bagi kaum modernis, situasi baru ini cukup jelas. Menurut kategori Soekarno, kelompok modernis ini “merintangi penyelesaian revolusi kita,” atau dengan memakai jargon komunis, mereka adalah golongan kepala batu, suatu *jargon* yang juga populer dalam kamus politik Soekarno.¹⁰

Sebagai kekuatan perintang, logika revolusioner Soekarno menyatakan lebih jauh, bahwa golongan modernis, terutama masyumi, tidaklah hidup pada masa Demokrasi Terpimpin. Sebaliknya, tiga partai Islam lainnya, yakni NU, PSII, dan Perti, berusaha menyesuaikan diri dengan demokrasi ala Soekarno tersebut. Mereka bersikap akomodatif sehingga bisa hidup berdampingan dengan Soekarno dan bertahan dalam alam demokrasi terpimpinnya Soekarno. NU adalah partai yang paling besar di antara ketiganya, karenanya dapat dianggap sebagai

⁹ Maurice Duverger, *Partai-Partai Politik dan Kelompok-kelompok Kepentingan*, terjemahan Laila Hasyim, Jakarta: Rajawali, 1981, hal. 134

¹⁰ *Ibid.*, hal. 135

pendukung utama setiap gagasan Soekarno. Bahkan, NU menikmati sekali iklim politik yang diciptakan Soekarno dengan sistem Nasakomnya.¹¹

Dalam periode Orde Lama, tampaknya peran umat Islam terpilahkan dalam tiga aspirasi besar : (1) Peran umat Islam yang bersikap kritis kepada negara yang diwakili oleh Masyumi; (2) Peran umat Islam yang bersikap akomodatif kepada negara yang diwakili oleh NU; (3) Peran umat Islam yang bersebelahan pemikiran (di luar pagar sampai memberontak) yang diwakili oleh gerakan DI/TII.¹²

Banyak kalangan Islam yang menilai bahwa kebijakan Presiden Soekarno tidak banyak berpihak terhadap umat Islam, mengingat banyaknya peran umat Islam sejak masa perjuangan sampai masa kemerdekaan. Hal ini menyebabkan kekecewaan di pihak umat Islam.

Kondisi perpolitikan pada masa Demokrasi Liberal yang diawali dengan tumbuh suburnya partai politik membawa dampak berkembangnya partai-partai politik baik yang beraliran agama, nasionalis dan marxis. Perkembangan Demokrasi Liberal yang ditandai dengan banyak partai itu ternyata tidak menguntungkan bagi negara yang berdasarkan Pancasila ini. Persaingan antar golongan atau partai tidak terelakkan, sebab masing-masing partai atau golongan ingin menangnya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan umum, akibatnya pemerintah menjadi tidak stabil. Faktor-faktor tersebut mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya

¹¹ Iqbal Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Medan: Prenada Media Grup, 2009, hal 285-286

¹² Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, hal. 115

kembali UUD. Dengan demikian menyebabkan berakhirnya era Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Kebijakan Politik dan Peran, kebijakan politik adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala negara dalam menghasilkan dan menetapkan aturan. Kebijakan politik amatlah penting karena segala keputusan baik berupa keputusan tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.¹³ Sedangkan peran yang artinya suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.¹⁴ Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan kebijakan politik Soekarno terhadap peran partai politik Islam maka kebijakan penyederhanaan partai politik yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin tidak memberikan kedudukan yang amat penting bagi partai politik, terutama peran partai politik Islam, diawali dengan partai Masyumi yang terpaksa harus membubarkan diri. Sementara partai NU, PSII, dan PERTI mau tidak mau harus tunduk pada sistem pemerintahan Soekarno, karena apabila mereka menentang sistem pemerintahan Soekarno akan bernasib sama seperti partai Masyumi yang harus bubar pada tahun 1960.

Berpijak dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh Kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam pada masa Orde Lama dalam bentuk penelitian.

¹³Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2011, hal. 102

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 40

2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mempunyai ruang lingkup permasalahan yang jelas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kondisi perpolitikan pada masa Orde Lama?
2. Bagaimana kebijakan politik Soekarno terhadap peran partai politik Islam pada masa Orde Lama?

Batasan Masalah

Melihat judul dan uraian pada latar belakang di atas, maka perlu pembatasan masalah. Karena, suatu penelitian akan bermanfaat dan fokus pada penelitiannya jika dilakukan secara jelas untuk menghindari perselisihan dan memfokuskan masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran kondisi perpolitikan pada masa Orde Lama
2. Kebijakan politik Soekarno terhadap peran partai politik Islam pada masa Orde Lama 1950-1965.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Bertolak pada rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis data tentang gambaran kondisi perpolitikan pada masa Orde Lama
2. Untuk menganalisis data tentang kebijakan politik Soekarno terhadap peran partai politik Islam pada masa Orde Lama

Kegunaan Penelitian

Dengan melihat tujuan di atas, maka hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini:
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca tentang Kebijakan Politik Soekarno terhadap Peran Partai Politik Islam pada masa Orde Lama 1950-1965
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini:
 - a) Dapat dijadikan acuan bahan rujukan bagi penelitian lain yaitu mengenai kebijakan Soekarno terhadap peran partai politik Islam pada masa orde lama
 - b) Penelitian ini dapat dijadikan acuan pedoman penelitian bagi mahasiswa Pascasarjana Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah Palembang. Mengenai kebijakan Soekarno terhadap peran partai politik Islam pada masa Orde Lama

4. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menelaah kepustakaan dan menjadikannya sebagai bahan acuan dan pembuktian bahwa penelitian ini sebelumnya belum pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam kaitannya mengenai judul penulis tentang Kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam pada masa orde lama, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti, yakni sebagai berikut:

Tesis yang berjudul *Pengaruh Islam dalam Pemikiran Soekarno Tahun 1915-1938*, disusun oleh Susi Lestari, menjelaskan ada unsur-unsur Islam dalam pemikiran Soekarno. Hal ini dapat disebutkan antara lain gagasan Soekarno tentang Nasakom (Nasionalisme, Islam dan Komunisme/Marxisme). Gagasan tentang Nasakom dianggap Soekarno sangat bersesuaian dengan ajaran Islam, baik dalam pemikiran tentang Nasionalisme ataupun Marxisme. Kemudian, pemikiran Soekarno banyak dipengaruhi oleh Islam. Tokoh-tokoh Islam yang berada di lingkungan Soekarno memberikan pengaruh yang besar terhadap pemikiran politik Soekarno yang bernuansa Islam.

Tesis yang berjudul *Sikap Soekarno terhadap Partai Masyumi* yang disusun oleh Zaini Muslim Ahmad, menjelaskan bagaimana Kemitraan politik Soekarno dengan Partai Masyumi yang selama 11 tahun dibina (1945-1956) akhirnya di tahun 1957 berubah menjadi sikap permusuhan yang tajam. Kemacetan politik sebagai akibat dari prematurnya Demokrasi Liberal dan desakan cita-cita Revolusi Indonesia yang menuntut untuk diselesaikan, menjadi faktor pendorong Soekarno untuk bersikeras mengambil alih kekuasaan. Langkah

Soekarno dalam mengambil kekuasaan dengan merubah sistem pemerintahan dan tatanan demokrasi mengundang perlawanan dari Partai Masyumi. Sikap oposisi yang kemudian ditunjukkan Partai Masyumi, mengundang reaksi keras dari Soekarno yang telah mendapatkan kembali kekuatan politiknya.

Tesis yang lain ditulis oleh Hadi Hartanto tahun 2005, dengan judul *“Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Politik Indonesia 1956-1965”*. Penelitian ini mengkaji tentang sejarah pertentangan Soekarno dengan Hatta mulai dari keduanya terlibat dalam organisasi pergerakan sampai keduanya duduk dalam pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan politik Indonesia tahun 1956-1965 serta mengetahui sejarah pertentangan Soekarno dengan Hatta, khususnya pada pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran kedua tokoh dan pengaruhnya terhadap kebijakan politik Indonesia.

Tesis yang ditulis oleh Ellen Christian Nugroho tahun 2002 dengan judul *“Sukarnoisme dalam Tinjauan Filsafat Politik”*, memaparkan sistematis mengenai asumsi dasar dari gagasan-gagasan sosial politik Soekarno, sehingga Soekarno disini dilihat sebagai pelaku politik, bukan seorang pemikir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan-tindakan Soekarno sebagai pelaku perpolitikan di Indonesia.

Tesis lainnya ditulis oleh Teguh Yudha tahun 2011 dengan judul *“Pemikiran Politik Soekarno (1927-1945)”*. Dalam penelitian ini, Yudha menjelaskan bahwa Soekarno merupakan tokoh yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Melihat pemikiran politiknya

Soekarno mampu membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melawan penjajah Soekarno menggunakan taktik politik yang berbeda-beda disetiap masa penjajahan. Pada masa Hindia Belanda Soekarno melawan dengan tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan di atas belum membahas membahas secara detail mengenai kebijakan politik Soekarno terhadap partai politik Islam pada masa Orde Lama. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengungkap segala yang berhubungan dengan kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam masa Orde Lama.

5. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka diperlukan landasan teori yang dianggap relevan. Adapun teori yang relevan digunakan sebagai alat ukur untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Untuk itulah, penulis menggunakan dua teori dalam penelitian ini, yaitu teori kebijakan politik.

Teori James E. Anderson, memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.¹⁵ James lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya berimplikasi: 1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, 2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau

¹⁵ James E. Anderson, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984, hal. 34

pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, 3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, 4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, 5) bahwa kebijakan dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.¹⁶

Nurchamid memberikan pengertian kebijakan sebagai keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri kebijakan adalah suatu peraturan dan ketentuan yang dapat mengatasi masalah¹⁷. Sementara itu menurut Winarno kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan tentu menghasilkan konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat. Akibat yang timbul dapat berupa akibat positif dan negatif. Dalam hal ini, yaitu berdasarkan teori tentang kebijakan tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan Soekarno telah membawa partai-partai

¹⁶ *Ibid.*, hal. 3-6

¹⁷ Syarbaini Syahril, *Sosiolog dan Politik. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002*, hal. 78

¹⁸ *Ibid.*, hal. 79

Islam harus tunduk dan patuh terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa Orde Lama.

Adapun pengertian politik menurut Surbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.¹⁹ Menurut Kartono, politik adalah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.²⁰

Menurut Syahril, di dalam bukunya *Sosiologi dan Politik* kata politik terbagi menjadi sebagai berikut:²¹

- a. Menunjuk segi kehidupan manusia untuk kekuasaan (*Power Relation*), misalnya kebebasan politik, kejahatan politik, kegiatan politik dan hal-hal politik.
- b. Tujuan yang hendak dicapai, misalnya politik keuangan, luar negeri, dalam negeri, ekonomi dan lain-lain.

Sedangkan Syahril juga mengemukakan pengertian kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem.²² Kebijakan politik juga dapat diartikan sistem konsep resmi yang menjadi landasan atau pedoman perilaku dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak politik negara.²³

¹⁹ Andi, *Fungsi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: LKIS, 2000, hal. 42

²⁰ Abdullah, *Kebijakan Sosial dan Dampaknya*. Jakarta; Pustaka, 2001, hal. 64

²¹ Syarbaini Syahril, *Sosiolog dan Politik*, hal. 13

²² *Ibid.*, hal. 14

²³ Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 68

Jadi, kebijakan politik adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala negara dalam menghasilkan dan menetapkan aturan. Kebijakan politik amatlah penting karena segala keputusan baik berupa keputusan tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

6. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Kebijakan Politik Soekarno Terhadap Politik Islam pada Masa Orde Lama”. Untuk mempermudah dan menghindari interpretasi yang berbeda-beda maka peristilahan yang terdapat dalam judul akan penulis jelaskan sesuai dengan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Kebijakan secara etimologi berasal dari kata bijak yang berarti pandai mempergunakan akal atau cendikia. Dalam kamus ilmiah yang di tulis oleh M. Dahlan al-Barry lalu ditambahi dengan imbuhan ke- dan –an dimana ketika suatu kalimat ditambahi imbuhan tersebut maka ada sebuah pergeseran makna menjadi, kumpulan yang pandai mempergunakan akal. Secara terminologi diartikan sebagai pertimbangan akal sehat untuk memutuskan suatu permasalahan atau kecerdikan dalam memutuskan hal-hal yang praktis. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau

terkait dengan aturan-aturan keputusan.²⁴

Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut dengan kebijakan adalah mengenai sesuatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan yang tertulis yang dikeluarkannya oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain.

Selanjutnya politik, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* merupakan hal-hal yang berkenaan dengan tata negara atau urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara.²⁵

Selanjutnya politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani *politika* (yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya *polites* (warga negara) dan *polis* (negara kota). Secara etimologi kata “politik” masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata “politis” berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata “politisi” berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Politik adalah segi khusus masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Tumpuan kajiannya terhadap daya upaya memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Politik juga mencakup aspek negara, kekuasaan dan kelakuan politik.²⁶ Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara

²⁴ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1995, hal. 893

²⁵ Alwi Hasan, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, hal. 23

²⁶ Syarbini Syahrial, dkk., *Sosiologi dan Politik*, hal. 13

berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.²⁷

Jadi, kebijakan politik adalah suatu tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi landasan atau pedoman dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan politik tidak bisa dilakukan atas dasar kepentingan politik tertentu, karena kebijakan politik sebagai upaya untuk mencari solusi yang dihadapi masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan Soekarno dalam tulisan ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia, beliau juga tokoh revolusioner, yang lahir di Blitar (Jawa Timur), 6 Juni 1901. Ia berhasil meraih gelar „Ir” pada 25 Mei 1926, dari *Technische Hoogeschool*, yang sekarang telah berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB), beliau juga berhasil mendirikan partai PNI (Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia Merdeka. Sebelumnya dia juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Soekarno sebagai seorang pejuang telah berkorban dan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka, bersama dengan Bung Hatta. Jadi dalam hal ini jasa Bung Karno tidak akan mungkin untuk bisa dihilangkan.²⁸ Disisi lain harus diketahui apa yang dicapai Soekarno setelah memegang tampuk pemerintahan tertinggi di Indonesia dari tahun 1945 hingga

²⁷ *Ibid.*, hal. 14

²⁸ Setiadi Andi, *Tiga Serangkai Pengubah Dunia*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2014, hal. 45

tahun 1965, bagaimana kondisi politik, ekonomi dan sosial di bawah pemerintahan Soekarno.

Kurun waktu dari tahun 1957-1965, meliputi usaha Presiden Soekarno mengembangkan kekuasaan pribadinya. Soekarno berhasil merebut kekuasaan negara dan memusatkan kekuasaan tersebut di tangannya sendiri. Kurun waktu itu juga memperlihatkan usaha Soekarno meluaskan kekuasaannya, dan Soekarno berhasil membuat dirinya menjadi Penguasa Tertinggi Republik Indonesia, Soekarno adalah Presiden, Panglima Tinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi, Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, dan berbagai gelar agung yang diberikan kepadanya. Hal ini juga yang menjadi faktor penyebab kediktatoran rezim Soekarno. Awal kediktatoran rezim Soekarno dimulai pada Februari 1957. Soekarno mengeluarkan konsepsi “Demokrasi Terpimpin” yang membawa dampak buruk bagi partai politik terutama partai politik Islam, di mana peran partai politik terbatas, karena partai-partai politik yang hidup pada masa demokrasi terpimpin terpaksa harus tunduk pada sistem pemerintahan Soekarno karena Soekarno dalam hal ini tidak segan-segan untuk membubarkan partai yang dianggap menolak system pemerintahan demokrasi terpimpin, seperti partai Masyumi.²⁹ Jadi, dalam hal ini Soekarno sebagai pemimpin dari Demokrasi Terpimpin.

Pengertian partai politik apabila dilihat dari kalimatnya terdiri dari dua kata, yaitu kata “partai” dan kata “politik”. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan,

²⁹ Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, hal. 76

ideologi, agama, bahkan kepentingan. Sementara itu, kata politik yang berarti proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.³⁰

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.³¹ Partai politik menurut istilah dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan organisasi ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. partai politik juga dapat diartikan sebagai organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Seperti partai NU, PSSI, PERTI. yang sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membawa agama Islam melalui panggung politik. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.³²

Dari pengertian partai politik di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, di mana para anggotanya memiliki tujuan yang sama untuk merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya.

³⁰ *Ibid.*, hal. 77

³¹ Alwi Hasan, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 89

³² Sjamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1993, hal. 65

Selanjutnya, kata Islam menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berpedoman pada kitab suci Al-qur‘an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.³³

Selanjutnya Islam berasal dari bahasa Arab “*aslama-yuslimu-islaman*” yang secara bahasa menyelamatkan.³⁴

Dengan demikian secara bahasa, makna Islam dapat dirangkum sebagai berserah diri kepada Allah SWT untuk tunduk dan taat kepada hukum-Nya sehingga dirinya siap untuk hidup damai dan menebar perdamaian dalam masyarakat dalam rangka untuk menaiki tangga atau kendaraan kemuliaan yang akan membawanya kepada kehidupan sejahtera dunia dan akhirat (Salamun).

Sementara itu, secara istilah, pengertian Islam yang diberikan oleh para ulama dan para cendekiawan muslim sangat bervariasi sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang keilmuan masing-masing. Akan tetapi definisi yang berbeda tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Antara lain:³⁵

1. Tolstói menyatakan bahwa Islam adalah satu- satunya aturan hidup yang diwahyukan untuk segenap umat manusia dari zaman ke zaman, dan bentuk terakhir yang sempurna adalah Islam yang ajarannya tersebut di dalam Al-qur‘an yang diwahyukan kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.
2. Syaikh Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam: Aqidah wa Syari‘ah* mendefinisikan Islam sebagai agama Allah yang ajaran-ajarannya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan penegasan kepada Nabi untuk

³³ Alwi Hasan, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 56

³⁴ Iqbal Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, hal. 89.

³⁵ Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hal.

menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama Allah (agama samawi) yang diwahyukan kepada rasul-rasul-Nya sejak Nabi Adam AS hingga yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Agama tersebut mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik keyakinan, ibadah, sosial, hukum, politik, ekonomi, akhlak, dan lain sebagainya maupun pedoman hidup bagi seluruh umat manusia agar dapat tercapai kehidupan yang diridhai Allah SWT dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.³⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa partai politik Islam adalah suatu kelompok orang-orang Islam yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang meletakkan Islam (Qur'an dan Hadist) sebagai dasar dan garis perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi maupun ide dan cita-cita umat Islam dalam suatu negara.

7. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat metode (cara) yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk mengidentifikasi sebuah topik atau judul penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam rumusan tersebut.³⁷

Penelitian adalah percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Penelitian dapat digolongkan atau dibagi ke dalam beberapa

³⁶ *Ibid.*, hal. 35

³⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian Sejarah*, Bogor: Ghalia Indonesia.2005, hal. 10

jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, diantaranya adalah penelitian berdasarkan: pendekatan, tujuan, tempat, bidang ilmu yang diteliti, dan teknik yang digunakan.³⁸ Penelitian yang dimaksud adalah:

1) Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data, tindakan, dan produk yang diperoleh dari penelitian itu adalah betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah ada atau diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada.³⁹ Dalam penelitian ini bertujuan sebagai pengembangan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai kebijakan politik Soekarno terhadap partai politik Islam pada masa Orde Lama. Untuk mengumpulkan sumber-sumber data digunakan metode sejarah yaitu, Heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

2) Pendekatan

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan dalam pelaksanaan penelitian, antara lain: pendekatan fenomenologis.⁴⁰ Pendekatan fenomenologis adalah usaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu atau mencoba menjelaskan dan mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998, hal. 125

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: IKAPI, 2008, hal. 15

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 9

didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai dan memahami fenomena yang dikaji. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis yang artinya berusaha memahami peristiwa sejarah politik yaitu bagaimana kebijakan politik Soekarno terhadap partai politik Islam pada masa Orde Lama.

3) Bidang Ilmu

Dalam bidang penelitian yang menjadi bidang ilmu kajian sejarah peradaban Islam, terutama yang berkaitan dengan sejarah Islam di Indonesia. Dari bidang ilmu tersebut, maka peneliti mengambil bahan kajian penelitian yang lebih spesifik, yaitu mengenai kebijakan politik Soekarno terhadap peran partai politik Islam pada masa Orde Lama. Ditinjau dari tempat penelitiannya. Penelitian ini dilakukan, di perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Sumatera Selatan, penelitian di kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, dan sumber-sumber yang relevan yang ada di perpustakaan dan kajian ini dilakukan dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur.

Penulisan penelitian yang berjudul Kebijakan Politik Soekarno Terhadap Peran Partai Politik Islam pada Masa Orde lama, termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang berifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian

dan sebagai bahan pembahasan hasil hasil penelitian.⁴¹ Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.⁴²

2. Jenis Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*Library research*). Data kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴³ Sedangkan menurut Kirk dan Miller, kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergabung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁴⁴

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber informasi yang berhubungan langsung dengan tema pokok penelitian, seperti dokumen, atau sumber informasi yang diciptakan di sekitar waktu yang sedang dipelajari, Sumber sekunder adalah istilah yang digunakan dalam historiografi untuk merujuk pada karya sejarah yang ditulis

⁴¹ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999, hal. 60

⁴² *Ibid.*, hal. 62

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 14

⁴⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hal. 3

berdasarkan pada sumber-sumber primer dan biasanya dengan merujuk pula pada sumber-sumber sekunder lainnya.⁴⁵ Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini di antaranya adalah: buku yang ditulis oleh Soekarno yang berjudul *di Bawah Bendera Revolusi I dan II*, buku yang ditulis oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia (1985) yang berjudul *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1967*. Harian Suara Merdeka yang terbit rentang tahun 1957-1960. Sumber sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa jurnal dan buku-buku relevan lainnya.

3. Pendekatan dan Metode Penelitian

1) Pendekatan penelitian

Untuk memahami data yang lebih mendalam maka penelitian ini diperlukan pendekatan keilmuan yaitu pendekatan sosiologis, politik.

a) Pendekatan Sosiologis

Digunakannya pendekatan ini menurut Weber adalah bertujuan untuk memahami arti subjektif dari kekuasaan sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti objektif. Dari sini, tampaklah fungsionalisasi sosiologi mengarahkan pengkajian sejarah pada pencarian arti yang dituju oleh tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif sehingga pengetahuan teoritislah yang akan mampu membimbing penelitian dalam menentukan motif-motif dari suatu tindakan atau factor-faktor dari suatu peristiwa.⁴⁶

Dengan demikian, dalam penelitian ini sangatlah perlu pendekatan

⁴⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terje. Nugroho Notosusanto, Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia, 1975, hal. 35

⁴⁶ *Ibid.*, hal 36

sosiologis dalam hal memahami kondisi masyarakat setempat, maupun pola kehidupan dan tatanan dalam bermasyarakat pada masa pemerintahan Soekarno, karena dengan memahami kondisi social masyarakatnya akan muncul sebuah analisa dalam mengungkap sejarah masa pemerintahan Soekarno.

b) Pendekatan Politik

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan politik yaitu dimana dalam proses politik biasanya masalah kepemimpinan dipandang sebagai faktor penentu dan senantiasa menjadi tolak ukur.⁴⁷ Untuk itu, penting diketahui klasifikasi kepemimpinan yang secara umum telah dibedakan oleh Max Weber dalam tiga jenis otoritas yaitu: (1) Otoritas karismatik yang didasarkan pada pengaruh dan kewibawaan pribadi, (2) Otoritas tradisional di mana dimiliki kepemimpinan berdasarkan pewarisan dan, (3) Otoritas legal-rasional, yang dimiliki berdasarkan jabatan dan kemampuannya.⁴⁸ Dalam pengertian tersebut pendekatan dalam bidang politik sangat mutlak diperlukan apabila penelitian ini untuk mencari pemahaman politik kekuasaan orde lama terhadap politik Islam di Indonesia.

Dengan demikian, dalam penelitian ini perlu pendekatan politik untuk memahami kondisi perpolitikan yang berhubungan dengan peristiwa yang dikaji, seperti kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Soekarno pada masa orde lama, bagaimana peran partai politik Islam pada masa Orde Lama, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi dan lain sebagainya. Dalam konteks tulisan ini, penggunaan pendekatan politik bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi pemerintahan Soekarno pada masa orde lama.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 37

⁴⁸ *Ibid.*, hal 38

2) Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat metode atau cara yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk mengidentifikasi sebuah topik atau judul penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam rumusan tersebut.⁴⁹ Karena penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka penelitian menggunakan metode penelitian sejarah. Ada empat langkah dalam metode penelitian sejarah, yaitu sebagai berikut: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, Historiografi.⁵⁰

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heurishen*, artinya memperoleh. Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan memperinci biografi, atau mengklasifikasikan dan merawat catatan-catatan terdahulu.⁵¹ Dengan demikian, peneliti mulai dapat menjaring sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah mengenai kebijakan politik Soekarno terhadap peran partai politik Islam pada masa Orde Lama.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah keabsahan tentang

⁴⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian Sejarah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 10

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 11

⁵¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hal. 55

keaslian sumber (otensitas).⁵² Peneliti melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber berarti ia menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan atau setidaknya dapat diuji berdasarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti kapan sumber itu dibuat, di mana sumber dibuat, dan siapa yang membuat. Kritik intern menguji sumber tentang kesahihan sumber (kredibilitas).⁵³ Pada kritik intern ini pertanyaan pokok untuk menetapkan kredibilitas ialah “nilai bukti apakah yang ada di dalam sumber?”. Bahwa kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan sah dan tidaknya bukti atau fakta sejarah.

3. Interpretasi

Interpretasi yaitu tahapan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah serta membandingkan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya, sehingga dapat ditetapkan makna dari fakta yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam merangkai fakta-fakta sejarah, berpedoman pada susunan kerangka yang logis menurut urutan kronologis dengan tema atau topik yang jelas sehingga mudah dimengerti.

4. Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi.⁵⁴ Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada tahapan terakhir dalam penelitian ini, peneliti melakukan penulisan sejarah dengan tujuan hasil yang ditulis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir. Berdasarkan penulisan tersebut akan dapat dinilai apakah penelitiannya

⁵² *Ibid.*, hal. 56

⁵³ *Ibid.*, hal. 61

⁵⁴ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012, hal. 99

berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakannya atau tidak, memiliki validasi dan rehabilitas yang memadai atau tidak, sehingga penulisan sejarah itu akan dapat ditentukan mutu penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah suatu cara mengumpulkan data dan mempelajari data dari literatur yang dianggap relevan.⁵⁵ Dalam teknik studi pustaka ini peneliti melakukan kegiatan membaca, mencatat dan mengkategorikan data menurut sub-sub masalah. Tujuan pengkategorian ini adalah agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat memudahkan peneliti dalam penyusunan hasil penelitian.

1. Teknik Analisis Data

1) Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif

Pengertian teknik analisis data sendiri adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.⁵⁶ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni suatu analisis data yang digunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detilnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam

⁵⁵ Muhammad Sudrajad Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hal. 77

⁵⁶ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hal. 64

dokumen atau bendanya.⁵⁷ Setelah seluruh data terkumpul kemudian dilakukan seleksi untuk dianalisa sesuai dengan topik dan tujuan penelitian. Dengan demikian teknik yang digunakan akan memperoleh gambaran hasil analisa mengenai kebijakan politik Soekarno terhadap peran partai politik Islam pada masa orde lama.

Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut maka digunakan salah satu dalam metode sejarah yaitu dilakukan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara termonologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi.⁵⁸ Pada tahap ini peneliti melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah tentang kebijakan politik Soekarno dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Peneliti akan melakukan perbandingan dengan data tersebut dan melakukan serangkaian interpretasi secara abstrak untuk membentuk struktur penulisan yang baik.

8. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang berjudul “Kebijakan politik Soekarno Terhadap Peran Partai Politik Islam pada masa Orde Lama” terdiri lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, hal. 22

⁵⁸ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hal. 64

Bab pertama, merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri atas: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang landasan teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui pengertian kebijakan, politik, peran, partai politik dan Islam dari beberapa ahli.

Bab ketiga, menguraikan tentang gambaran kondisi perpolitikan pada masa Orde Lama. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kondisi perpolitikan pada masa orde lama.

Bab keempat, menguraikan tentang kebijakan politik Soekarno terhadap peran partai politik Islam pada masa Orde Lama. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan politik Soekarno dan peran partai politik Islam pada masa Orde Lama.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan, dan saran.

BAB II

PEMAHAMAN PENGERTIAN KEBIJAKAN, POLITIK, PERAN, PARTAI POLITIK DAN PENGERTIAN ISLAM

1. Pengertian Kebijakan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis, haluan dalam mencapai tujuan.⁵⁹

Menurut *Kamus Bahasa Inggris*, kebijakan berasal dari kata “policy”. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis.⁶⁰ Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan pemerintah, partai politik dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 120

⁶⁰ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press. 1995, hal. 893

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan menurut bahasa adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi system pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan yang dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Defnisi lain dikemukakan oleh Nurchamid yang memberikan pengertian bahwa kebijakan adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.⁶¹ Menurut Winarno kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan terarah.⁶² Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.⁶³

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁶⁴

James E. Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a*

⁶¹ Andi, *Fungsi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: LKIS, 2000, hal. 42

⁶² Abdullah, *Kebijakan Sosial dan Dampaknya*. Jakarta: Pustaka, 2001, hal 65

⁶³ Anderson, *Public Policy Making*. Cetakan ke-3. New York: Holt Rinehart and Winston, 1978, hal. 33

⁶⁴ Syarbaini, *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 78

problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).⁶⁵

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.⁶⁶

Definisi lain dikemukakan oleh Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno yang menyarankan agar kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.⁶⁷ Pendapat dari kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Sementara itu, Abidin menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Semua kebijakan baik yang melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, pasti memiliki dampak/akibat yang ditimbulkan.⁶⁸ Misalnya saja, kebijakan

⁶⁵ James E. Anderson, *Public Policy Making*, hal.64

⁶⁶ Hadi, *Kebijakan Publik dan Strateginya*. Kompas, 2005, hal. 6

⁶⁷ Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Gramedia, 2006, hal. 45

⁶⁸ Sudarwin, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hal. 58

politik Soekarno membawa dampak bagi perpolitikan di Indonesia, yang membawa dampak pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Dan pemusatan kekuasaan di tangan Militer dan PKI, sedangkan partai Islam dalam hal ini mau tidak mau harus tunduk pada presiden.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah: “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.”⁶⁹

Adapun menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.⁷⁰ Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:⁷¹

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
2. Adanya *output* kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.

⁶⁹ Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia, 2006, hal 23

⁷⁰ *Ibid.*, hal 24

⁷¹ Kencana, *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2005, hal 67

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang guna mencapai maksud dan tujuan tertentu, di mana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, yang pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

2. Pengertian Politik

Politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota, kemudian arti itu berkembang menjadi polities yang berarti warga negara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politics yang berarti kewarganegaraan.⁷²

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* politik merupakan hal-hal yang berkenaan dengan tata negara atau urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara⁷³. Politik adalah sebuah segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Tumpuan kajiannya terhadap daya

⁷² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 63

⁷³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 54

upaya memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Politik juga mencakup aspek negara, kekuasaan dan kelakuan politik.⁷⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian politik menurut bahasa adalah proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya, yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya.

Menurut Plato dan Aristoteles politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik di dalam politik, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat hidup dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas.⁷⁵ Max Weber mengemukakan bahwa politik adalah sarana perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan baik di antara negara-negara maupun di antara hukum dalam suatu Negara.⁷⁶

Menurut Karl W. Deutsch politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision*)

⁷⁴ Syarbaini, *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 13

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 14

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 15

marking), kebijaksanaan (*policy of beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).⁷⁷

Hans Kelsen mengatakan bahwa politik mempunyai dua arti, yaitu sebagai berikut.⁷⁸

- a. Politik sebagai etik, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna.
- b. Politik sebagai teknik, yakni berkenaan dengan cara (teknik) manusia atau individu untuk mencapai tujuan.

Menurut Rod Hague politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.⁷⁹

Andrew Heywood mengemukakan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Sedangkan secara praktis, politik mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu (negara sebagai lembaga yang dinamis).⁸⁰

Menurut Surbakti politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah

⁷⁷ Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hal. 67

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 68

⁷⁹ Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 72

⁸⁰ Wijoyo, *Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 2005, hal. 131

tertentu⁸¹. Sedangkan menurut Kartono, politik adalah aktifitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.⁸²

Menurut Syahrial, di dalam bukunya *sosiologi dan politik* kata politik terbagi menjadi sebagai berikut:⁸³

- a. Menunjuk segi kehidupan manusia untuk kekuasaan, misalnya kebebasan politik, kejahatan politik kegiatan politik dan hal-hal politik.
- b. Tujuan yang hendak dicapai, misalnya politik keuangan, luar negeri dalam negeri ekonomi dan lain-lain.

Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam studi sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yaitu tujuan yang menyangkut dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi (*private goals*).⁸⁴ Menurut Maurice Duverger bahwa Politik adalah kekuasaan, kekuatan adalah seluruh jaringan lembaga-lembaga (*institutions*) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini suasana didominasi beberapa orang atas orang lain.⁸⁵

Selain itu, Deliar Noer mengemukakan bahwa politik adalah ilmu yang memusatkan masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama masyarakat Menurut

⁸¹ *Ibid.*, hal. 132

⁸² Ghazali, *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hal. 34

⁸³ Iqbal Nasution, *Pemikiran Politik Islam (Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 89.

⁸⁴ Imawan, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 23

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 24

Joyce M. Mitchel Poitik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.⁸⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian politik adalah sebuah tahapan di mana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warganegara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik.

3. Pengertian Peran

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peran adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁸⁷ Sedangkan peran secara terminologi adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.⁸⁸

Dari pengertian peran di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

⁸⁶ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011, hal. 102

⁸⁷ Alwi Hasan, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 89

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 103

Sedangkan peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.⁸⁹

Peran menurut Merton didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu yang melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan peran adalah efektivitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan peran politik maka dapat disimpulkan bahwa peran politik adalah sebagai aktifitas, pola tingkah laku seseorang yang memiliki kedudukan tertentu di dalam pemerintahan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan suatu pemerintahan.

4. Pengertian Partai Politik

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Partai politik juga diartikan sebagai organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga diartikan perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seazas, sehaluan, setujuan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.⁹¹

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 56

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 57

⁹¹ Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 120

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian partai politik menurut bahasa adalah golongan atau kelompok sosial dengan berdasarkan kesamaan tertentu untuk mendapatkan hal yang dikehendaki atas dasar kepentingan masyarakatnya. Salah satunya dengan cara meraih kekuasaan.

Partai-partai yang terorganisir timbul pada akhir abad ke 18 dan ke 19 di Eropa Barat. Sebagai buah dari usaha kelompok-kelompok di luar lingkungan kekuasaan politik untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintahan dan mengendalikan jabatan pemerintahan. Ketika gerakan-gerakan kelas menengah dan kelas buruh ini mulai mendesak kelas-kelas atas dan arisitokrat demi partisipasi dalam pembuatan keputusan, kelompok-kelompok yang menjalankan pemerintahan terpaksa mencari dukungan publik dalam rangka mempertahankan pengaruh dukungan mereka.⁹² Dengan demikian partai-partai politik itu merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dan di dunia modern, sifat-sifat dari sistem kepartaian suatu negara menentukan sifat dari hubungan ini. Partai politik merupakan salah satu bagian kekuatan politik yang berperan penting dalam suatu negara.

Carl Friedrich memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya.⁹³

Sementara itu, Soltau memberikan defenisi partai politik sebagai

⁹² Rahman, *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 34

⁹³ Sjamsuddin Nazaruddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1993, hal. 23

sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Partai politik dapat juga dikaitkan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitutionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁹⁴

Di sisi lain, Ranney dan Kendall mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam Pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol terhadap birokrasi dan kebijakan publik dalam proses politik.⁹⁵

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis public yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.⁹⁶

G. Satori dalam bukunya *Parties and Party System* juga menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 24

⁹⁵ Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 72

⁹⁶ Suntana, *Kapita Selekta Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal. 78

untuk menduduki jabatan-jabatan publik dalam proses perpolitikan di dalam pemerintahan.⁹⁷

Dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Miriam Budiarto, menjelaskan bahwa Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik pertama sekali lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhatikan serta diikuti sertakan dalam proses politik.⁹⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kondensasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Dari pendapat di atas dapat juga dikemukakan bahwa partai politik pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yaitu organisasi yang teratur, terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu merebut dan atau mempertahankan kekuasaan. Adapun cara-cara yang dicapai untuk mencapai tujuannya, partai politik turut serta dalam kegiatan yang konstitusional seperti pemilihan umum.

4. Pengertian Islam

Kata Islam berasal dari bahasa Arab “aslama-yuslimu-islaman” yang secara kebahasaan yang berarti “menyelamatkan”. Kata Islam juga dapat diambil dari kata assilmu dan assalmu yang artinya perdamaian dan keamanan⁹⁹ Islam juga diartikan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 79

⁹⁸ Nusrati, *Sistem Politik Islam (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Nur-al Huda, 2015, hal. 39

⁹⁹ Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 54

diturunkan Allah dalam Alqur‘an dan disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnahnya yang shahih/benar, yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan kesejahteraan di hari kemudian/kiamat. Islam juga diartikan segala apa yang diisyaratkan oleh Allah dengan perantara para Nabi dan Rasulnya yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan, serta petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan kesejahteraan di hari kemudian atau akhirat.¹⁰⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Islam menurut bahasa adalah berserah diri, tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya pada kehendak Allah.

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tawairjiri, mendefenisikan Islam sebagai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesankannya dan melaksanakan syariatnyadengan penuh ketaatan atau melepaskan dari kesyirikan.¹⁰¹ Umar bin Khatab mendefenisikan Islam sebagai agama yangditurunkan allah kepada Muhammad SAW, agama ini meliputi akidah, syariat dan akhlak. George Sarton mendefenisikan Islam sebagai agama yang paling tepat sekaligus paling indah.¹⁰²

Jadi, dapat disimpulkan Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya, berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Pengertian Islam juga dapat disimpulkan sebagai suatu sistem peraturan-peraturan atau undang-undang yang meliputi peraturan-peraturan hidup manusia dan tata cara tingkah laku bagi manusia yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad

¹⁰⁰ Nusrati. *Sistem Politik Islam (sebuah pengantar)*, Jakarta: Nur-al Huda, 2005, hal. 87

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 88

¹⁰² *Ibid.*, hal. 89

SAW dari Tuhannya yang diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia dengan akibat pahala bagi mentaatinya dan hukuman bagi yang mengingkarinya.

²⁵⁰ Hari Sumarno, *Manusia Indonesia Manusia Pancasila*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984, hal. 87

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari permasalahan yang telah diuraikan di muka, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kebijakan politik Soekarno dan dampaknya sebagai berikut:

Sejarah Indonesia mencatat bahwa di negara ini pernah dilaksanakan sebuah sistem politik yang disebut Demokrasi Terpimpin. Sistem sebelumnya dinamakan Demokrasi Parlementer. Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi perubahan orientasi sistem politik yang hendak dikembangkan. Bila pada masa sebelumnya (Parlementer), sistem politik berorientasi pada demokrasi multi partai, di mana partai-partailah kekuatan utama politik, maka di masa Terpimpin partai-partai justru diperlemah dengan dikeluarkannya kebijakan penyederhanaan partai politik melalui Penpres No.7 tahun 1959 dan Perpres No.13 tahun 1960, maka yang sebelumnya pada masa demokrasi parlementer jumlah partai sebanyak 40 partai berubah menjadi 10 partai.

Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin peran Presiden Sukarno sangat kuat, sehingga dapat dikatakan otoriter, karena bila dilihat kebijakan penyederhanaan partai politik yang dikeluarkan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin melalui Penpres No.7 tahun 1959 dan Perpres No.13 tahun 1960. Membawa partai Islam mengalami pembatasan peran diantaranya: Masyumi yang bernasib buruk, karena dengan dikeluarkannya kebijakan penyederhanaan menjadi alat Soekarno untuk membubarkan partai Masyumi, yang dianggap tidak

mendukung sistem pemerintahan Soekarno. Sementara partai Islam seperti PSII, PERTI, dan NU, lebih bersikap menyesuaikan diri dengan alam Soekarno. Tetapi Partisipasi partai Islam dalam pemerintahan dari tahun 1957 hingga 1965 tidak memberi warna bagi kabinet tersebut dan oleh sebab itu kurang berarti buat kedudukan umat Islam.

Peranan partai Islam di parlemen dan MPRS juga tidak cerah. Seperti wakil dari NU, PSII dan Perti. Wakil-wakil mereka ikut duduk baik dalam DPR Gotong Royong (DPR yang dibentuk oleh Soekarno) maupun dalam kabinet. Tetapi kedudukan mereka dibanding dengan DPR hasil pemilihan umum 1955 melemah, jumlah mereka dibanding dengan DPR-GR berkurang.

B. Saran

Dari paparan tesis pada bab-bab sebelumnya, penulis sadari ini merupakan sebagian kecil dari latar belakang kebijakan politik orde lama baik yang bersifat pasif maupun aktif. Termasuk kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno lainnya. Untuk itu perlu dikembangkan serta dijadikan acuan untuk melihat kebijakan-kebijakan politik lainnya yang diterapkan pada masa pemerintahan orde lama.

REFRENSI

- A. Azizy Qodri. 2004. *Jejak-jejak Islam Politik*. Jakarta: Ditjen Bagais
- Abdillah. 2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Abdullah. 2001. *Kebijakan Sosial dan Dampaknya*. Jakarta; Pustaka,
- Abdulgani Roeslan. 1963. *Sosialisme Indonesia*, Jakarta: Depan.
- Adams Cindy. 1982. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Adeng Muchtar dan Ghazali. 2004. *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Cet. 1. Bandung : Pustaka Setia.
- Alfian. 1980. *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ahmad Suhelmi, 2002. *Polemik Negara Islam: Sukarno Vs Natsir*. Jakarta: Teraju.
- Al-Rahab Amirudin, 2014. *Ekonomi Berdikari Sukarno*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- A. Muhaimin Yahya. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Andi. 2000. *Fungsi Pelayanan Publik*. Ygyakarta: LKIS
- Anderson. 1978. *Public Policy Making*. Cetakan ke-3. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Anwar Rosihan. 1981. *Sebelum Prahara Politik: Pergolakan Politik 1961-1965*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Budiarjo Miriam. 1998. *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.
- Dali Thahier. 1985. *Islam dan Pancasila*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Djojohadikusumo Sumitro. 1953. *Persoalan ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Indira

- Duverger Maurice. 1981. *Partai-Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Kepentingan*. Terjemahan Laila Hasyim. Jakarta:
- Effendy Bahtiar, 2000. *Politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, cet. ke-1. Bandung: Mizan.
- Erka. 1978. *Bung Karno Kepada Bangsa*, Semarang : CV. Aneka Ilmu.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*. London : Cornell University Press
- Ghazali. 2004. *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi. 2005. *Kebijakan Publik dan Strateginya*. Kompas.
- Hadianto Sujono. 1994. *Dari Ekonomi Kolonial ke Ekonomi Nasional*, tanpa penerbit.
- Hans, D.K., Richard, I.H., Ian B. 2000. *Partai, Kebijakan Dan Demokrasi*. Terjemahan Sigit Jatmiko. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono Ganis. 1989. *Cakrawala Politik Era Soekarno*. Jakarta: Haji Masagung,
- Hatta Mohammad. 2008. *Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Bandung : Segi Arsy.
- Hornby, 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press.
- Imawan. 2003. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution Iqbal. 2010. *Pemikiran Politik Islam (Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Karim. 2007. *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Kantaprawira Rusadi. 1997. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Kencana. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Kirbiantoro, S dan Rudianto Dody. 2006. *Pergulatan Ideologi Partai Politik di Indonesia*, Jakarta : Inti Media Publisher.
- Ma'arif Syafi'i Ahmad. 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ma'arif Syafi'i Ahmad. 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Madjid Nurcholish, 2004. *Indonesia Kita*, Jakarta: Universitas Paramadina.
- Mashad Dhurorudin. 2008. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar.
- Murntas. 2010. *Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution Iqbal. 2009. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Medan: Prenada Media Grup.
- Natsir Muhammad, *Islam Sebagai Ideologi*, Jakarta: Penyiaran Ilmu, tanpa tahun
- Negoro Suryo Arifin. 2009. *Biografi Hartini Soekarno*. Yogyakarta: Ombak.
- Noer Deliar, 1982. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Noer Deliar. 1983. *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal* Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Noer Deliar. 1987. *Partai Islam di pentas Nasional*, Jakarta: Mizan
- Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Nusrati. 2015. *Sistem Politik Islam (sebuah pengantar)*, Jakarta: Nur-al Huda.
- Poerwantana, 1994. *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Poesponegoro Djoened Marwati dan Nugroho Notosusanto, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rabi'ah. Rumidan. 2000. *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ricklefs M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta : Serambi.

- Rusli Karim. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Wiyono, 1982. *Organisasi Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sanit Arbi, 2007. *Sistem Politik di Indonesia : Kestabilan, peta kekuatan politik dan pembangunan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sastroatmojo Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press.
- Setyohadi Tuk. 2002. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: CV. Rajawali Cooperation.
- Sjamsuddin Nazaruddin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Soekanto. 1994. *Sosiolog Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarno, 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi
- Soroto & Doddi Rudianto. 2003. *Partai-Partai Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Mandala Pratama.
- Sudarwin. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudirman Adi. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Hingga Terkini*. Yogyakarta: DIVA press.
- Sukarna. 1990. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sumarno Hari. 1984. *Manusia Indonesia Manusia Pancasila*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunanto Musyrifah. 2012. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suntana. 2010. *Ija Kapita Selektta Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsudin Nazaruddin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Syarbaini. 2002. *Sosiolog dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia

- Syarifudin Jurdi. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Thoha. 2003. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Tim Penyusun Kamus. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tomso. 2003. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Widjaja Albert. 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.
- Wijoyo. 2005. *Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Winarno. 2006. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Gramedia.
- Yulianto Arif. 2002. *Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orba*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Yuwono Sudarsono. 1991. *Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik*. Jakarta: Obor.
- Zuhri Saifrudin, 1981. *Kaleidoskop Politik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zuhri Saifuddin, 1987. *Berangkat dari Pesantren*. Jakarta: Gunung Agung

